



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 6 Mei 2011 telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2010 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan keuangan tersebut terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Ternate.

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan A.1.1.7 atas Laporan Keuangan, nilai Persediaan dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.029.036.300,00. Atas saldo persediaan tersebut diketahui adanya persediaan pada DPPKAD yang dicatat tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik akhir tahun dan tidak dinilai berdasarkan harga perolehan sebesar Rp460.272.655,00. Karena BPK tidak dapat melakukan prosedur alternatif lainnya, maka saldo persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp460.272.655,00 (22,68%) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan A.1.2.1 atas Laporan Keuangan, nilai Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.106.000.000,00 yang dicatat berdasarkan metode harga perolehan. Pencatatan atas dana bergulir tersebut belum didukung data pembayaran terakhir, dan kebijakan penetapan umur piutang dari pengelola dana bergulir. Jika Pemerintah Kota Ternate telah menyajikan nilai investasi non permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka akan berpengaruh secara material terhadap nilai investasi non permanen per 31 Desember 2010.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan A.1.2.2 atas Laporan Keuangan, nilai Investasi Permanen di Neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.632.272.265,43. Atas nilai investasi permanen tersebut diantaranya: (1) penyertaan modal pada PD CG senilai Rp1.600.000.000,00 dicatat dengan metode harga perolehan dan tidak didasarkan laporan keuangan PD CG tahun 2010; dan (2) penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp3.982.272.265,43 dicatat sebesar laba tahun 2009 yang dimuat dalam laporan keuangan PDAM Tahun 2009 yang belum diaudit. Jika Pemerintah Kota Ternate telah menyajikan nilai investasi permanen berdasarkan metode ekuitas dengan didukung Laporan Keuangan yang telah diaudit dan porsi kepemilikan yang jelas maka akan berpengaruh secara material terhadap nilai investasi permanen per 31 Desember 2010.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan A.1.3 atas Laporan Keuangan, nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 dilaporkan sebesar Rp941.595.674.146,57. Atas pelaporan nilai aset tetap tersebut diketahui: (1) realisasi belanja modal tahun 2010 sebesar Rp100.569.236.838,00 sedangkan kenaikan Aset Tetap menurut Bidang Aset sebesar Rp102.333.026.136,24 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.763.789.298,24; (2) terdapat selisih sebesar Rp103.170.447,00 antara saldo awal aset tetap yang dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2009 yang telah diaudit sebesar Rp805.439.340.041,00 dengan saldo awal yang digunakan dalam pencatatan aset tetap tahun 2010 sebesar Rp805.542.510.488,00; (3) terdapat aset tetap yang tidak diketahui

keberadaannya sebesar Rp26.597.514.367,00; (4) aset tetap yang rusak berat sebesar Rp8.898.435.089,00 tidak didukung inventarisasi atas rincian dan kondisi aset tetap yang rusak berat; (5) aset tetap yang telah diserahkan kepada PDAM Kota Ternate senilai Rp5.948.631.100,00 belum didukung rincian aset tetap yang diserahkan; (6) aset tetap sebanyak 89 bidang tanah dan 41 unit kendaraan belum dinilai kembali dengan harga wajar; (7) aset tetap berupa 30 unit kendaraan senilai Rp3.880.672.967,00 dikuasai mantan pejabat dan mantan anggota dewan; dan (8) aset tetap sebanyak 19 bidang tanah dan bangunan yang direncanakan untuk diserahkan oleh Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kota Ternate namun belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima dan telah disajikan sebagai aset tetap oleh Pemerintah Kota Ternate dalam Neraca per 31 Desember 2010 senilai Rp19,00. Jika selisih tersebut telah didukung data dan penjelasan yang cukup, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, rusak berat, dan yang telah diserahkan ke PDAM Kota Ternate dapat ditelusuri, aset tetap sebanyak 89 bidang tanah dan 41 unit kendaraan telah dinilai dengan harga wajar dan 30 unit kendaraan dikuasai kembali oleh Pemerintah Kota Ternate maka akan berpengaruh secara material terhadap nilai aset tetap yang dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2010.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan A.2.1.1 atas Laporan Keuangan, nilai Utang PFK yang dilaporkan di neraca per 31 Desember 2010 dilaporkan sebesar Rp242.823.028,00. Atas saldo utang PFK tersebut diketahui: (1) terdapat selisih antara perhitungan nilai Utang PFK Barang dan Jasa serta Gaji pada BUD per 31 Desember 2010 dengan nilai yang dilaporkan di Neraca sebesar Rp65.271.722,00; (2) terdapat penyeteroran PFK di tahun 2010 atas sisa PFK tahun 2009 yang tidak menjadi bagian saldo utang PFK per 31 Desember 2009 sebesar Rp19.181.464,00; dan (3) terdapat Utang PFK bersaldo minus pada dua SKPD senilai Rp2.732.000,00. Jika selisih dan penyeteroran PFK tahun 2009 di 2010 sebesar Rp87.185.186,00 telah didukung data dan penjelasan yang cukup maka akan berpengaruh secara material terhadap nilai utang PFK per 31 Desember 2010.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.1.1 atas Laporan Keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2010 sebesar Rp21.442.993.424,00. Hasil perbandingan antara realisasi PAD dalam LRA dengan penerimaan bersih PAD yang masuk ke rekening Kas Daerah setelah dikurangi pengembalian belanja dari bendahara pengeluaran terdapat selisih sebesar Rp1.287.758.367,00. Selisih tersebut diantaranya pengembalian tunjangan sertifikasi guru yang diterima di tahun 2009 dicatat mengurangi pendapatan sebesar Rp822.675.000,00 dan sisanya sebesar Rp465.083.367,00 belum dapat dijelaskan. Jika selisih PAD sebesar Rp465.083.367,00 telah didukung data dan penjelasan yang cukup maka akan berpengaruh secara material terhadap terhadap realisasi PAD dalam LRA Tahun 2010.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2 atas Laporan Keuangan, realisasi Belanja Daerah dilaporkan dalam LRA Tahun 2010 sebesar Rp454.843.014.632,00. Hasil pengujian laporan pertanggungjawaban belanja seluruh SKPD diketahui jumlah belanja tahun 2010 sebesar Rp449.499.316.023,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.343.698.609,00. Atas selisih tersebut, pemerintah Kota Ternate telah berupaya melakukan rekonsiliasi untuk menyajikan nilai belanja yang sebenarnya namun BPK belum meyakini kewajaran nilai belanja yang dihasilkan dari tiga laporan yang berbeda yaitu : (1) Laporan Pertanggungjawaban Belanja SKPD tahun 2010 menyajikan realisasi belanja sebesar Rp455.050.229.066,00; (2) SP2D Definitif dikurangi pengembalian belanja menyajikan realisasi belanja sebesar Rp452.510.680.746; dan (3) Laporan perhitungan sisa uang persediaan tahun 2010 menyajikan realisasi belanja sebesar Rp455.146.812.729,00. Jika selisih Belanja sebesar Rp5.343.698.609,00 telah didukung data dan penjelasan yang cukup maka akan berpengaruh secara material terhadap terhadap realisasi belanja daerah dalam LRA Tahun 2010.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.1.2 atas Laporan Keuangan, realisasi Belanja Barang dilaporkan dalam LRA Tahun 2010 sebesar Rp75.010.001.747,00 termasuk di dalamnya belanja perjalanan dinas sebesar Rp24.839.896.724,00. Hasil pengujian atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas diketahui belanja perjalanan dinas pada dua SKPD sebesar Rp1.842.490.000,00 (1.797.480.000,00 + 45.010.000,00) belum didukung bukti perjalanan dinas berupa tiket pesawat pulang pergi, lembar kunjungan (visum), undangan dari pihak eksternal, kuitansi kontribusi/setoran, dan tidak ada di *manifest* penerbangan. Karena tidak adanya bukti pendukung perjalanan dinas maka BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran realisasi perjalanan dinas dalam LRA Tahun 2010 sebesar Rp1.842.490.000,00 (2,46%).

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.3.1.1 atas Laporan Keuangan, nilai Penerimaan Pembiayaan -Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam LRA Tahun 2010 sebesar Rp2.871.609.770,00. Nilai penggunaan SiLPA tersebut tidak berasal dari nilai SiLPA dalam LRA Tahun 2009 sebesar Rp2.632.445.166,00 atau terdapat selisih sebesar Rp239.164.604,00 yang belum dapat dijelaskan. Karena tidak adanya data dan informasi yang menjelaskan selisih tersebut, BPK tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran nilai SiLPA Tahun 2010 sebesar Rp239.164.604,00 (3,49%).

Karena permasalahan yang diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK **tidak menyatakan pendapat** atas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2010.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 04.B/LHP/XIX.TER/07/2011 dan Nomor 04.C/LHP/XIX.TER/07/2011 tanggal 05 Juli 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 11 Juni 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Maluku Utara  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

  
Eydu Oktain Panjaitan, S.E., MM., Ak.  
Akuntan, Register Negara No. D.15297